

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa
HASIL/OUTPUT	: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 35% dan Laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan Laki-laki 68,3% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktivitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 7.477.000
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
		 AGUS DWIYANTO GAYO JD, S.STP., M.Si. Nip. 19870821 200602 1 002	

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Jen Gender : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah						
		Faktor Kesenjangan	Subst Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/ Data Dasar Base Line	Target Kinerja/ Indikator Gender
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAGARI	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda	Akses Setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Budaya Korp, dimana penanaman gender tidak didukung oleh kebijakan Penganggaran Gendered yang sesuai tidak langsung berpengaruh pada masyarakat; 2. GAP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender dimana gender dipahami sebagai merendahkan perempuan; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang strategis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan baik-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender	Input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Usaha (Mubakat Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan) Output: Tingkat Keterwakilan Perempuan Tingkat Responsif gender dengan memperhatikan aspek gender	Target : Peningkatan akses perempuan Peningkatan partisipasi perempuan di Musrenbang Jorong, Tingkat Keterwakilan Perempuan Tingkat Responsif gender dengan memperhatikan aspek gender
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Proses Perencanaan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menyaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan susunan, efektif dan efisien.	Akses Kontrol/Kewenangan Berdiskusi dan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan beladiri antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.						

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2024 adalah 31,5% dan Laki-laki 68,5% Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan Laki-laki 68,3%	Aspek Partisipasi Kerlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki- laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengutamakan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat atapun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki cenderung mengutamakan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun pertanian. Kondisi ini ketika tidak dibalung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan memiliki "karung bertambara" bagi perempuan.	3 Kurang koordinasi antar lembaga; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya keterayauan dari perempuan.	output: Terbaikannya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keperwakilan laki- laki dan perempuan outcome: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	output: Terbaikannya Musrenbang Tk Kecamatan outcome: Terakomodirnya perencanaan Tk Nagari dan Kecamatan
---	---	---	---	--	--



GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN BUKIT SUNDI
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
HASIL/OUTPUT	1. Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 35% dan Laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 32 % dan Laki-laki 68 %. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah Laki - Laki. Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki - Laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki- laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah Perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari. Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki- laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi,

	drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - triarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktivitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender
		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 10.672.025-
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
	 CAMAT VICE FEBRIANELDI, S.STP, M.Si NIP. 198702082006021001		

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN BUKIT SUNDI

No	1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender		Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil		
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Baso Line	Target Kinerja/Indikator Gender
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda. Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki.	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat.	1 Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergi dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta muarembang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan	Input: Pelaksanaan Muayawarah Pembangunan Daerah (Mufakat Jorong, Muarembang Tk Nagari dan Kecamatan)	Input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Muarembang), dengan proses Mufakat Jorong, Muarembang Nagari, Muarembang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Muarembang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Muarembang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Muarembang belum Responsif Gender.	2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll.		b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender		

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 35% dan Laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 32% dan Laki-laki 68%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun pembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "lewat bermanfaat" bagi perempuan.		3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.			output: Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan outcomes: Terakomodirnya masukan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
--	---	--	--	---	--	--	---	--

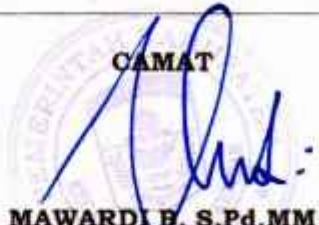
Muaro Paneh, 07 Mei 2026
Camat Bukit Sundi,



VICE FEBRIANELDI, S.STP, M.Si
NIP. 19870821 200602 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN DANAU KEMBAR
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 35% dan Laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan Laki-laki 68,3% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi		
		Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 7.014.000
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
		 CAMAT MAWARDI B. S.Pd.MM Nip. 19770506 200012 1 002	

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN DANAU KEMBAR

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/ Data Dasar Base Line	Target Kinerja/ Indikator Gender
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda). Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	1. Budaya kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat; 2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender	Input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan)	Input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2024 adalah 35% dan Laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan Laki-laki 68,3%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		output: Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
--	---	--	--	---	--	---	--

Simpang Tanjung, Nan Ampek, 19 Mei 2026

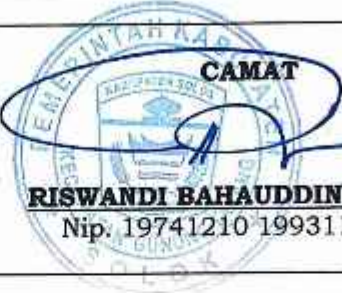
Camat,

MAWARDI B. S.Pd.MM

NIP. 19770506 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN GUNUNG TALANG
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	: 7.01.03.2.10.0001
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat : Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 adalah 45% dan Laki-laki 55% Perempuan pada Musrenbang Nagari tahun 2026 adalah 40% dan Laki-laki 60% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki <u>Akses Kontrol/Kewenangan</u> Partisipasi berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki. Dimana pada pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	<u>Aspek Partisipasi :</u> Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki- laki. <u>Aspek Manfaat</u> Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami hanya mendahulukan perempuan; - Patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, wali nagari, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas. - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 9.270.000.-
		Out Put	Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki- laki dan perempuan
		Out Come	Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan
		 CAMAT RISWANDI BAHAUDDIN, AP.S.Sos Nip. 19741210 199311 1 001	

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027
KECAMATAN GUNUNG TALANG**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kelompok / Program / Kegiatan / Tujuan	Dato Pemimpin Perempuan	Isi Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Pelaku Kewaspadaan	Sekolah Kewaspadaan Informal	Bobot Kewaspadaan Halaqah	Rencana Aksi Tujuan	Rencana Aksi	Teleskopi Rincian/Date Danur Base Line	Target Kewaspadaan Gender
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAR NAGARI Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dusun Masyarakat yang terdampak Masyarakat Jorong, Pemukiman Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Perempuan	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Brando Kandung dan KAS diundang, Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Studi daya kerja, dimana pemukiman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang sesuai 100% jorong berpengaruh pada masyarakat	1. Masih terbelakangnya pemukiman masyarakat terdampak gender, dimana gender dipandang sebagai mata rantai pemukiman	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang strategis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menegakkan pemukiman masyarakat dengan memperhatikan pemukiman pemukiman laki-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas untuk pemukiman memperhatikan konsep pengarusutamaan gender	Input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Musdak) Jorong, Murenbang, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas	Output : Terwujudnya pemukiman pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas
Sub Kegiatan: Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah di Desa	Pemantauan Rutin Perempuan pada Musyawarah Nagari Tahun 2026 adalah 40% dan laki-laki 60% Perempuan pada Musyawarah Tahun 2028 45% dan laki-laki 55%	Aspek Partisipasi Distribusi perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musyawarah yang bisa mengaktifkan permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki		3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 4 Terbelakangnya kualitas dan kuantitas pengempuan diri			Output: Terlaksananya Musyawarah Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan	Output: Terlaksananya Musyawarah Tk. Kecamatan

Tujuan: Terwujudnya Pembinaan Persekolahan yang sekolah dan berkualitas persekolahan dalam persekolahan yang regional guru							Indikator: Pembinaan sekolah persekolahan persekolahan yang regional guru persekolahan persekolahan	Indikator: Pembinaan persekolahan persekolahan persekolahan
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal: 5 Mei 2020
Cendek



RISA NANDI BANAUDDIN, AP, S. Bus
NIP. 19741218 198011 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN HILIRAN GUMAAMTI
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 45% dan Laki-laki 55% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktivitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN HILIRAN GUMANTI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kandung dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender	Input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat Jorong, Murenbang Tk Nagari dan Kecamatan)	Input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.
	Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien	Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;				

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2023 adalah 48% dan Laki-laki 52% Perempuan pada Musrenbang Tahun 2024 40% dan Laki-laki 60%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terlihat dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		3 Kurang Koordinasi antar lembaga, Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.			output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan outcome: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan outcome: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
---	--	---	--	---	--	--	---	---

Talang Babungo, Mei 2026
Camat,



ZULBAKTI, S.Pd, MM

NIP. 19690327 199005 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN JUNJUNG SIRIH
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	: 7.01.03
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 adalah 40% dan Laki-laki 60% Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 41,2% dan Laki-laki 58,8% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi “kurang bermanfaat” bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 6.000.000.-
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
			
	CAMAT NENI AMELIA, S.STP. Nip. 19820221 200012 2 001		

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN JUNJUNG SIRIH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawancara	Isa Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolak Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan protokol Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Sundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat; 2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas uraian kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender	input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan) input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.	

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terleakannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 adalah 40% dan Laki-laki 60% dan pada Musrenbang 2026 perempuan 41,2% dan Laki-laki 58,8%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.			output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Peninggahan, Mei 2026



CAMAT

NENI AMELIA, S.STP
NIP. 19820221 200012 2 003

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN KUBUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2024 adalah 51,9% dan Laki-laki 48,1% Perempuan pada Musrenbang 44,3% dan Laki-laki 55,7% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari. Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas

mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.

b. Penyebab Internal

- Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat
- SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.

c. Penyebab Eksternal

- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;
- patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;
- Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas
- Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.

Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktivitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender
		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 12.000.000.-
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
 CAMAT  ACIL FASRA, S.IP, MM NIP. 198801032007011003			

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN KUBUNG

0	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kegiatan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pemula Wawancara	Faktor Keseluruhan	Inti Gender	Sebab Keseluruhan Internal	Sebab Keseluruhan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Kebijakan Dan Rencana Aksi	Target
PROGRAM PAMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Burung Kandiung dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Budaya Kerja, dimana pelaksanaan gender tidak dilakukan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintahan, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;	1 Masih terbatasnya pemahaman tentang gender, dimana gender dipahami sebagai laki-laki dan perempuan;	Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergi dan terkelompokan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	6. Keterlibatan peserta musrenbang dengan memperhatikan peserta laki-laki dan perempuan.	Input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Musdat) Jorong, Musrenbang TK Nagari dan Kecamatan)	Input : Terkompleksnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan aspek prioritas.
	Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Musdat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menyalurkan informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien	Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa masyarakat yang hadir adalah laki-laki. Musrenbang Nagari dan Kecamatan memberikan kesempatan untuk perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2 SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	2 Alanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll.	b. Dalam pengusahan skala prioritas usulan Kecamatan memprioritaskan konsep pengarusutamaan gender			

Suatu Kegiatan Penting dalam Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	Persentase Kehadiran Persentase pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 adalah 51,9% dan Laki-laki 48,1% Perempuan pada Musrenbang 44,3% dan Laki-laki 55,7%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa perempuan cenderung mengabaikan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat maupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, maupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas menguasai pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainage maupun jembatan. Kondisi ini berarti tidak dilibatkan oleh partisipasi aktif dalam bentuk kebijakan pada saat menentukan prioritas mengkilaskan pembangunan yang dilakukan menjadi "Kurang bermartabat" bagi perempuan.	3. Kurang Koordinasi antar lembaga, Perencana, Pelaksana dan Pengawas;	4. Terbatasnya kapasitas dan ketrampilan kepemimpinan di masyarakat.	output: Terleaksanya Musrenbang kecamatan dengan mengutamakan laki-laki dan perempuan	output: Terlaksananya musrenbang Tk Kecamatan
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang strategis dan terlembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender					outcome: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	outcome: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan


 Salaya, 29 April 2026
 Camat
ACIL FASRA, S.I.P., MM
 NIP. 19880103 200701 1 003

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)	Akses Setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah perempuan	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengrusatanan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan	Input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Musakat Daerah) (Musakat Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan)	Input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Musakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.		b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender		

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2024 adalah 35% dan laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan laki-laki 68,3%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan amalnya kepercayaan diri perempuan.			output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
--	---	---	--	---	--	--	---	---

Abbas Panjung, 4 Mei 2026

Andi

ANDI SOFIANI, S.Sos
NIP.19750619 2008011 002



GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	: 7.01.03.2.01.0001
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa
HASIL/OUTPUT	: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perwakilan Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 42,47% dan Laki-laki 57,53% Perwakilan Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 55,71% dan Laki-laki 44,28% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah perempuan Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 2:1. Kurangnya jumlah laki-laki yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari laki-laki dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	Aspek Partisipasi : Keterlibatan laki-laki sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktivitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 5.460.000
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
			
	CAMAT ANDI SOFIANI, S.Sos NIP. 19750619 200801 1 002		

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD	: KECAMATAN LEMBANG JAYA
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	: 7.01.03
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
HASIL/OUTPUT	: Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan

ANALISIS SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan

- Unsur Masyarakat yang terlibat Adalah Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Pemuda;
- Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien;
- Persentase Kehadiran : Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 adalah 10% dan Laki-laki 90% Perempuan pada Musrenbang Kecamatan 2026 35% dan Laki-laki 65%.

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Isu

Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

b. Faktor Kesenjangan

Akses :

Setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki

Akses Kontrol/Kewenangan :

Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan

laki-laki adalah 1:3. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

Aspek Partisipasi :

Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Aspek Manfaat :

Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.

Kesenjangan juga ditimbulkan akibat :

1. Penyebab Internal

- Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat;
- SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.

2. Penyebab Eksternal

- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;
- Triarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;
- Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas;
- Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.

Rencana Aksi**Rencana Aksi****Tujuan**

- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender

Aktifitas

- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan;
- Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengarusutamaan gender untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui sosialisasi dan media informasi lainnya.

Sumber Daya (Out Put)

Dana : Rp. 7.975.364.-

Out Put

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Out Come

Terakomodirnya Perencanaan Tingkat Nagari dan Kecamatan



KECAMATAN LEMBANG JAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI	Umur Masyarakat yang terlihat : Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Pemuda	Aspek Akses Selain umur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bunda Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Budaya Kerja dimana pemahaman gender tidak ditulung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat	1 Masih keterbelakangan pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai pendahuluan perempuan;	Tujuan : Terwujudnya Pemencanaan Pembangunan yang sinergis dan diutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan	Input : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Muhabang Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan)	Input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Proses Pemencanaan Pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan proses Rembuk Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan keserasan, efektif dan efisien	Aspek Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:3. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;		b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan dan gender	Output : Terkenalnya Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan	Output : Terkenalnya musrenbang tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pemencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 adalah 10% dan Laki-laki 90% Perempuan pada Musrenbang Kecamatan 2026 35% dan Laki-laki 65%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.		3 Kurang Koordinasi antar lembaga, Perencana, Pelaksana dan Pengawas;		c. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengarusutamaan gender untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui sosialisasi dan media informasi lainnya.	Outcomes : Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	Outcomes : Terakomodirnya perencanaan tingkat Nagari dan Kecamatan
Tujuan: Terwujudnya Pemencanaan Pembangunan yang sinergis dan terakomodirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender		Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengemukakan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, maupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dll. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengemukakan pembangunan jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.				

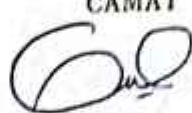
Bukti Stlh. 04 Juni 2029

Gansel

AGUS SETIADI M.D., S.I.P., M.Si
NIP. 198807112010011012

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	: KECAMATAN PANTAI CERMIN 2017
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa
HASIL/OUTPUT	: Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat antara lain: Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda). Proses Perencanaan : pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran : Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 35% dan Laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan Laki-laki 68,3% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki. Akses Kontrol/Kewenangan: Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat : Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - triarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

Rencana Aksi	Rencana Aksi	Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 3.780.000
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
		CAMAT  GERRY CANDRA, S.STP,M.SI, NIP. 19910815 201206 1 002	

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN PANTAI CERMIN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)	Akses Setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kandung dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki.	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a.Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan	input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan)	input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.
Keputati Koordinasi Keputan Pemberdayaan Desa	Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan	Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat	2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;		b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender.		
	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2024 adalah 35% dan Laki-laki 65%. Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan Laki-laki 68,3%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.		3. Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas;				

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah	Masih Rendah		Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa Tujuan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender		Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		4. Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.			output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan

Surian, 2 April 2026
Camat Pantai Cermin,



GERRY CANDRA, S.STP, M.Si
NIP. 19910815 201206 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KODE PROGRAM	: 7.01.03
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 adalah 45% dan Laki-laki 55% Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 45% dan Laki-laki 55% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan : Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 4:5. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari. Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat : Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas

	mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi “kurang bermanfaat” bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - triarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender
		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 7.372.768,54
		Out Put	Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
	 Taruko Sirukam, 29 April 2026 ALKAMRA ADLIS, SH, MM Nip. 19700807 199203 1 008		

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;	1 Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan	input: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan)	input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 4:5. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;		b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender		

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2025 adalah 45% dan Laki-laki 55% Perempuan pada Musrenbang Tahun 2026 45% dan Laki-laki 55%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.			output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
--	---	---	--	---	--	--	---	---



Taruko Sirukam, 29 April 2026

Gamat

ALKAMRAADLIS, SH, MM

NIP. 19700807 199203 1 008

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

NAMA PERANGKAT DAERAH	Kecamatan X Koto Singkarak
UNIT ORGANISASI	Kecamatan X Koto Singkarak
TAHUN ANGGARAN	2027
PROGRAM	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
TUJUAN SUB KEGIATAN	Meningkatkan efektivitas PKK dan keterlibatan laki-laki dalam kegiatan PKK.
KODE KEGIATAN	SUB 7.01.03.2.01.0003
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka wawasan ➤ Berdasarkan data keanggotaan PKK Kecamatan X Koto Singkarak dari total 26 orang anggota, didominasi oleh perempuan sebanyak 25 orang (96,15%), sedangkan laki-laki hanya 1 orang (3,85%). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi gender, khususnya rendahnya keterlibatan laki-laki dalam kegiatan pemberdayaan keluarga melalui PKK. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : Akses: - Partisipasi laki-laki rendah sehingga akses terhadap kegiatan PKK belum setara - Informasi kegiatan PKK lebih banyak menjangkau perempuan dibanding laki-laki - Waktu pelaksanaan kegiatan kurang sesuai bagi laki-laki yang bekerja - Tidak semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat aktif - Pelaksanaan kegiatan belum merata di seluruh wilayah sehingga akses masyarakat berbeda-beda Partisipasi - Terdapat kesenjangan partisipasi dalam kegiatan PKK, dimana keterlibatan masih didominasi oleh perempuan, sementara partisipasi laki-laki dan keaktifan seluruh kader belum optimal serta belum merata pada setiap tahapan kegiatan. Kontrol - Pengambilan keputusan dalam kegiatan PKK masih didominasi oleh kelompok tertentu (kader aktif) - Kader yang kurang aktif memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat - Laki-laki hampir tidak terlibat dalam perencanaan maupun evaluasi kegiatan

	- Kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan belum merata di seluruh kader b. Sebab Kesenjangan Internal : Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang responsif gender, keterbatasan kapasitas dan motivasi kader, serta belum meratanya sistem komunikasi dan pembagian peran dalam organisasi.
	c. Sebab Kesenjangan Eksternal : Budaya dan norma sosial, keterbatasan waktu akibat pekerjaan, serta belum meratanya akses informasi dan dukungan lingkungan, sehingga partisipasi masyarakat khususnya laki-laki dalam kegiatan PKK masih rendah.
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PKK yang partisipatif, merata, dan responsif gender melalui keterlibatan aktif seluruh kader serta mendorong partisipasi laki-laki dan masyarakat secara lebih luas.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)	Rp. 200.000.000,-
RENCANA AKSI	Melakukan sosialisasi inklusif, penjadwalan fleksibel, peningkatan kapasitas kader, pemerataan kegiatan, penguatan komunikasi, pelibatan laki-laki, monitoring keaktifan kader, serta penyediaan fasilitas pendukung guna meningkatkan partisipasi yang merata dan responsif gender.
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS	Output: sebagai target Jumlah kegiatan PKK terlaksana: 5 kegiatan/tahun Persentase kehadiran kader: $\geq 80\%$ Keterlibatan laki-laki: $\geq 10\%$ peserta Cakupan wilayah: 100% dusun melaksanakan kegiatan Outcome: Persentase partisipasi laki-laki meningkat dari 3,85% menjadi $\geq 10\%$ Persentase kader aktif meningkat dari 60% menjadi $\geq 85\%$ Cakupan wilayah kegiatan meningkat dari 70% menjadi 100%.

Singkarak, Mei 2026



CHRISMON DARMA, S. IP
 NIP. 19880330 200701 1 001

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : KECAMATAN X KOTO SINGKARAK
Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender : Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil Basis Data	Indikator Kerja
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tujuan: Meningkatkan efektivitas PKK dan keterlibatan laki-laki dalam kegiatan PKK	- Berdasarkan data keanggotaan PKK Kecamatan X Koto Singkarak dari total 26 orang anggota, didominasi oleh perempuan sebanyak 25 orang (96,15%), sedangkan laki-laki hanya 1 orang (3,85%). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi gender, khususnya rendahnya keterlibatan laki-laki dalam kegiatan pemberdayaan keluarga melalui PKK. - -	Akses: - Partisipasi laki-laki rendah sehingga akses terhadap kegiatan PKK belum setara. Informasi kegiatan PKK lebih banyak menjangkau perempuan dibanding laki-laki. Waktu pelaksanaan kegiatan kurang sesuai bagi laki-laki yang bekerja. Tidak semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat aktif. Pelaksanaan kegiatan belum merata di seluruh wilayah sehingga akses masyarakat berbeda-beda. Partisipasi - Terdapat kesenjangan partisipasi dalam kegiatan PKK, dimana keterlibatan masih didominasi oleh perempuan, sementara partisipasi laki-laki dan keaktifan seluruh kader belum optimal serta belum merata pada setiap tahapan kegiatan. Kontrol: - Pengambilan keputusan dalam kegiatan PKK masih didominasi oleh kelompok tertentu (kader aktif). Kader yang kurang aktif memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat. Laki-laki hampir tidak terlibat dalam perencanaan maupun evaluasi kegiatan. Kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan belum merata di seluruh kader.	- Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang responsif gender, keterbatasan kapasitas dan motivasi kader, serta belum meratanya sistem komunikasi dan pembagian peran dalam organisasi. -	- Budaya dan norma sosial, keterbatasan waktu akibat pekerjaan, serta belum meratanya akses informasi dan dukungan lingkungan, sehingga partisipasi masyarakat khususnya laki-laki dalam kegiatan PKK masih rendah. -	- Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PKK yang partisipatif, merata, dan responsif gender melalui keterlibatan aktif seluruh kader serta mendorong partisipasi laki-laki dan masyarakat secara lebih luas. -	- Melakukan sosialisasi inklusif, penjadwalan fleksibel, peningkatan kapasitas kader, pemerataan kegiatan, penguatan komunikasi, pelibatan laki-laki, monitoring keaktifan kader, serta penyediaan fasilitas pendukung guna meningkatkan partisipasi yang merata dan responsif gender.	Input : Basis data bersumber dari dokumen administrasi keanggotaan PKK Kecamatan X Koto Singkarak yang terpilah menurut jenis kelamin. Data tersebut menunjukkan komposisi anggota PKK sebanyak 26 orang, terdiri dari 25 perempuan dan 1 laki-laki. Basis data ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan analisis gender untuk melihat kesenjangan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Input : - Rp. 200.000.000,00 Output sebagai target Jumlah kegiatan PKK terlaksana: 10 kegiatan/tahun Persentase kehadiran kader: ≥80% Keterlibatan laki-laki: ≥ 10% peserta Cakupan wilayah: 100% dusun melaksanakan kegiatan Outcome Persentase partisipasi laki-laki meningkat dari 3,85% menjadi ≥10% Persentase kader aktif meningkat dari 60% menjadi ≥85% Cakupan wilayah kegiatan meningkat dari 70% menjadi 100% dusun

Singkarak, Mei 2026



CHRISMON DARMASIP
NIP. 19880330 200701 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN X KOTO SINGKARAK
Program : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender :			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan: Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Tujuan: "Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kecamatan yang responsif gender serta menjamin kesetaraan akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan."	- "Berdasarkan data buku tamu pelayanan Kecamatan, pengunjung layanan didominasi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran lebih besar dalam mengakses layanan administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Sementara itu, partisipasi laki-laki dalam mengakses layanan secara langsung masih relatif rendah," dengan rincian 421 perempuan 240 laki-laki	Akses: - "Waktu pelayanan yang bertepatan dengan jam kerja laki-laki menyebabkan keterbatasan akses bagi laki-laki dalam memanfaatkan layanan keperluan keluarga, sehingga perempuan lebih dominan sebagai pengguna layanan." Partisipasi - Persepsi sosial yang menempatkan urusan administrasi sebagai tanggung jawab perempuan berdampak pada rendahnya partisipasi laki-laki dalam proses pelayanan, sehingga keterlibatan menjadi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan." Kontrol: Meskipun perempuan lebih banyak mengakses layanan, pengambilan keputusan dalam keluarga sering masih didominasi laki-laki.	- Masih rendahnya kesadaran dan kemauan laki-laki serta adanya persepsi bahwa urusan administrasi merupakan tanggung jawab perempuan."	- "Jam pelayanan yang terbatas pada jam kerja menyebabkan masyarakat yang bekerja, khususnya laki-laki, sulit mengakses layanan." - Norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab administrasi keluarga mempengaruhi rendahnya keterlibatan laki-laki."	- "Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif gender melalui peningkatan akses, partisipasi, dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan layanan publik."	- "Melakukan penyesuaian jam pelayanan agar lebih fleksibel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat." - "Melaksanakan sosialisasi pelayanan secara inklusif kepada laki-laki dan perempuan untuk mendorong partisipasi yang seimbang." - "Mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengurusan administrasi melalui kegiatan penyuluhan di masyarakat." - "Menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses oleh semua"	Jumlah pengunjung pelayanan di Kantor Camat X Koto Singkarak Tahun 2025 berjumlah 651 orang, yang terdiri dari perempuan 421 Orang, laki-laki 240 Orang	Input : - Rp. 5.300.000,- Output "Meningkatnya partisipasi laki-laki dalam pengurusan administrasi." "Tersedianya informasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat." Outcome "Meningkatnya kesetaraan akses layanan antara laki-laki dan perempuan." "Meningkatnya keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelayanan." "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan." "Terwujudnya pelayanan kecamatan yang responsif gender." "Berkurangnya kesenjangan akses dan partisipasi dalam pelayanan publik."

Singkarak Mei 2026
KAMAT
CHRISMON DARMA, S.IP
NIP. 19880320 200401 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

NAMA PERANGKAT DAERAH	Kecamatan X Koto Singkarak
UNIT ORGANISASI	Kecamatan X Koto Singkarak
TAHUN ANGGARAN	2027
PROGRAM	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dialaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
SUB KEGIATAN	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan.
TUJUAN SUB KEGIATAN	"Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kecamatan yang responsif gender serta menjamin kesetaraan akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan."
KODE SUB KEGIATAN	7.01.03.2.01.0003
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka wawasan ➤ "Berdasarkan data buku tamu pelayanan Kecamatan, pengunjung layanan didominasi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran lebih besar dalam mengakses layanan administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Sementara itu, partisipasi laki-laki dalam mengakses layanan secara langsung masih relatif rendah." dengan rincian 250 perempuan 130 laki-laki 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : Akses: - "Waktu pelayanan yang bertepatan dengan jam kerja laki-laki menyebabkan keterbatasan akses bagi laki-laki dalam memanfaatkan layanan keperluan keluarga, sehingga perempuan lebih dominan sebagai pengguna layanan." Partisipasi - Persepsi sosial yang menempatkan urusan administrasi sebagai tanggung jawab perempuan berdampak pada rendahnya partisipasi laki-laki dalam proses pelayanan, sehingga keterlibatan menjadi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan." Kontrol - Meskipun perempuan lebih banyak mengakses layanan, pengambilan keputusan dalam keluarga sering masih didominasi laki-laki. b. Sebab Kesenjangan Internal : Masih rendahnya kesadaran dan kemauan laki-laki serta adanya persepsi bahwa urusan administrasi merupakan tanggung jawab perempuan."

	c. Sebab Kesenjangan Eksternal : - Jam pelayanan yang terbatas pada jam kerja menyebabkan masyarakat yang bekerja, khususnya laki-laki, sulit mengakses layanan. - Norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab administrasi keluarga mempengaruhi rendahnya keterlibatan laki-laki.
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif gender melalui peningkatan akses, partisipasi, dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan layanan publik.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)	Rp. 5.300.000,-
RENCANA AKSI	- Melakukan penyesuaian jam pelayanan agar lebih fleksibel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. - Melaksanakan sosialisasi pelayanan secara inklusif kepada laki-laki dan perempuan untuk mendorong partisipasi yang seimbang. - Mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengurusan administrasi melalui kegiatan penyuluhan di masyarakat. - Menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat.
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS	Output: - Meningkatnya partisipasi laki-laki dalam pengurusan administrasi. - Tersedianya informasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat Outcome: - Meningkatnya kesetaraan akses layanan antara laki-laki dan perempuan. - Meningkatnya keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelayanan. - Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. - Terwujudnya pelayanan kecamatan yang responsif gender. - Berkurangnya kesenjangan akses dan partisipasi dalam pelayanan publik

Singkarak, Mei 2026



CHRISMON DARMA S. IP
NIP. 19880330 200701 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : KECAMATAN X KOTO SINGKARAK
Program : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender :			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan: Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Tujuan: "Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kecamatan yang responsif gender serta menjamin kesetaraan akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan."	- "Berdasarkan data buku tamu pelayanan Kecamatan, pengunjung layanan didominasi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran lebih besar dalam mengakses layanan administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Sementara itu, partisipasi laki-laki dalam mengakses layanan secara langsung masih relatif rendah," dengan rincian 421 perempuan 240 laki-laki	Akses: - "Waktu pelayanan yang bertepatan dengan jam kerja laki-laki menyebabkan keterbatasan akses bagi laki-laki dalam memanfaatkan layanan keperluan keluarga, sehingga perempuan lebih dominan sebagai pengguna layanan." Partisipasi - Persepsi sosial yang menempatkan urusan administrasi sebagai tanggung jawab perempuan berdampak pada rendahnya partisipasi laki-laki dalam proses pelayanan, sehingga keterlibatan menjadi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan." Kontrol: Meskipun perempuan lebih banyak mengakses layanan, pengambilan keputusan dalam keluarga sering masih didominasi laki-laki.	- Masih rendahnya kesadaran dan kemauan laki-laki serta adanya persepsi bahwa urusan administrasi merupakan tanggung jawab perempuan."	- "Jam pelayanan yang terbatas pada jam kerja menyebabkan masyarakat yang bekerja, khususnya laki-laki, sulit mengakses layanan." - Norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab administrasi keluarga mempengaruhi rendahnya keterlibatan laki-laki."	- "Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif gender melalui peningkatan akses, partisipasi, dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan layanan publik."	- "Melakukan penyesuaian jam pelayanan agar lebih fleksibel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat." - "Melaksanakan sosialisasi pelayanan secara inklusif kepada laki-laki dan perempuan untuk mendorong partisipasi yang seimbang." - "Mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengurusan administrasi melalui kegiatan penyuluhan di masyarakat." - "Menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses oleh semua"	Jumlah pengunjung pelayanan di Kantor Camat X Koto Singkarak Tahun 2025 berjumlah 651 orang, yang terdiri dari perempuan 421 Orang, laki-laki 240 Orang	Input : - Rp. 5.300.000,- Output "Meningkatnya partisipasi laki-laki dalam pengurusan administrasi." "Tersedianya informasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat." Outcome "Meningkatnya kesetaraan akses layanan antara laki-laki dan perempuan." "Meningkatnya keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelayanan." "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan." "Terwujudnya pelayanan kecamatan yang responsif gender." "Berkurangnya kesenjangan akses dan partisipasi dalam pelayanan publik."

Singkarak Mei 2026
KAMAT
CHRISMON DARMA, S.IP
NIP. 19880320 200401 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	: KECAMATAN TIGO LURAH
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 30% dan Laki-laki 70% Perempuan pada Musrenbang 30% dan Laki-laki 70% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

	Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi “kurang bermanfaat” bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.		
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktivitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 6.720.735
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
		 CAMAT TEDI AURORA, S.Pd.MM Nip. 19710101 199210 1 1001	

KECAMATAN TIGO LURAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujan	Data Pembuka Wawancara	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Aksi		Peta	
		Faktor Kewenangan	Sebab Kewenangan Internal	Sebab Kewenangan Eksternal	Rahformulasi Tujan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja/Data Dasar Rasio 1:100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI	Unsur Masyarakat yang terlibat : Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Pemuda	Akses Setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kenduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan	Input : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Muslat Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan)
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pembendayaan Desa	Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Rembuk Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Akses Kontrol/Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:3. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2. BOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;		b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender	Output : Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 5% dan Laki-laki 95% Perempuan pada Musrenbang Kecamatan 2026 30% dan Laki-laki 70%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.		3. Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas;		c. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengarusutamaan gender untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui sosialisasi dan media informasi lainnya.	Outcomes : Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender		Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.		4. Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.			

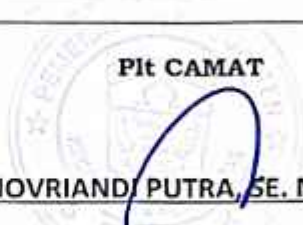
Batu Datarang, Mei 2026
Cantat

 TELUKURURAH, 3 Pd.MM
NIP. 197101011992101001

Langkah 5
ukuran Hasil
Target Kinerja/Indikator Gender
Input : Terselenggaranya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.
Output : Terselenggaranya musrenbang tingkat Kecamatan
Outcomes : Terselenggaranya perencanaan tingkat Nagari dan Kecamatan

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
SKPD	: KECAMATAN X KOTO DIATAS
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI
KODE PROGRAM	:
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat Jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2026 adalah 35% dan Laki-laki 65% Perempuan pada Musrenbang 31,7% dan Laki-laki 68,3% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Isu : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah a. Faktor Kesenjangan Akses : setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki Akses Kontrol/Kewenangan Partisipasi Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.

		Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada Masyarakat - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.	
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	- Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan - Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender

		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 12.300.000
		Out Put	Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
		Out Come	Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan Kecamatan
	 Pit CAMAT <u>NOVRIANDI PUTRA, SE. ME. Akt</u> Nip. 19721101 199703 1 003		

KECAMATAN X KOTO DIATAS

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Masih Rendah			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolak Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN NAGARI	Unsur Masyarakat yang terlibat Masyarakat Jorong, Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda	Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki	1. Budaya kerja, dimana pemahaman gender tidak dihiraukan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan	input : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Muslat) Jorong, Musrenbang Tk Nagari dan Kecamatan	input : Terakomodasinya rencana pembangunan di Tingkat Jorong, Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas
Kegiatan : koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Proses Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan proses Muslat jorong, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk meninjau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat base, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Akses Kontrol/Kewenangan Berlatarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2, kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Jorong dan tingkat Nagari.	2. SDN dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll.		b. Dalam penyusunan skala prioritas utukan keramatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender		

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Nagari Tahun 2024 adalah 33% dan laki-laki 63% Perempuan pada Musrenbang 31,3% dan laki-laki 68,3%	Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat	3. kurang koordinasi antar lembaga Perencana, Pelaksana dan Pengawas 4. Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang integratif dan menyeluruh dalam pembangunan yang responsif gender.	terhadap sosial budaya, pendidikan dsu. Sedangkan laki-laki mayoritas menghasilkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.	output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan. outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan.	outcome: Terakomodirnya perencanaan Tk. Nagari dan kecamatan.
---	---	--	---

X foto Diatas, 2 April 2020

Camat,

NOVRIANDI PUTRA, S.Pd, ME, Akt

NIP. 19721101 199703 1 003